

**ANALISIS *IJĀRAH* DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-
MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA KAMAR PONDOK
PESANTREN DI MASA PANDEMI *COVID-19***

**(Studi Kasus di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur Jemur
Wonosari Wonocolo Surabaya)**

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Alwan Waliyyuddin

NIM. C72218081



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Alwan Waliyyuddin

Nim : C72218081

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis *ijārah* dan fatwa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sewa Kamar Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* (studi kasus di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Desember 2021

Saya yang menyatakan



Mohammad Alwan Waliyyuddin

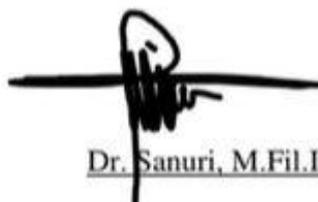
NIM. C72218081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *ijārah* dan Fat wa DSN MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sewa Kamar Pondok Pesantren dimasa pandemi *Covid-19* (studi kasus di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya)”, yang ditulis oleh Mohammad Alwan Waliyyuddin NIM.C72218081 ini telah di periksa dan di setuju untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 03 Desember 2021

Pembimbing,



Dr. Sanuri, M.Fil.I

NIP.197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Alwan Waliyyuddin C72218081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 11 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosa Skripsi:

Penguji I

Dr. Sanjuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji II

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Moh. Irfan, MHI
NIP. 196905312005011002

Penguji IV

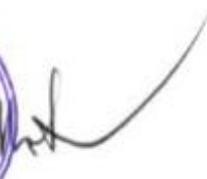
Elly Uzlifatul Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 14 Januari 2022

Mengesahkan. Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Alwan Waliyyuddin
NIM : C72218081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : alwansono@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

**ANALISIS *ILRAH* DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017
TERHADAP SEWA KAMAR PONDOK PESANTREN DI MASA PANDEMI
COVID-19 (Studi Kasus di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur Jemur
Wonosari Wonocolo Surabaya)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2021

Penulis

Mohammad Alwan Waliyyuddin

Jika di lihat dari segi bisnis, usaha *ijārah* tempat ini cukup digemari masyarakat Jemur Wonosari sebagai bisnis sampingan, usaha ini sangat berpotensi dan juga cukup menjanjikan dalam berinvestasi, dan tidak lupa dari semua ini yakni dalam suatu usaha tertentu terdapat suatu kerjasama yang akhirnya bertujuan untuk mendapatkan yang terbaik dalam sebuah kesepakatan.

Dalam kegiatan *ijārah* sebelum adanya pandemi *Covid-19* yang dilakukan oleh santri dengan pemilik pondok, yakni santri memberikan uang sebagai pembayaran dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemilik pondok, karena sebelumnya sudah ditetapkan terkait dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di awal akan di mulainya perjanjian oleh pengurus terkait dengan fasilitas yang akan di dapatkan dan diperoleh santri ketika berada di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur.

Akan tetapi dalam praktiknya, praktik *ijārah* di masa pandemi *Covid-19* ini tidak segampang yang diharapkan, beberapa yang ada hubungannya dengan apa yang ada di kesepakatan di awal perjanjian itu tidak di jelaskan secara jelas, sehingga timbul beberapa masalah yang perlu di damaikan dengan melihat beberapa aspek yang sudah ada. Contohnya tentang biaya pondok terkait *ijārah* kamar pondok, kepada seluruh santri jika santri ini tidak sedang menempati Pondok, dalam

waktu yang cukup lama akan tetap disuruh untuk membayar biaya pondok, dan pondok pesantren Mahasiswa An-Nur di sini memberikan potongan 15% kepada santri yang masih di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur, yang awalnya biaya pondok sebelum pandemi *Covid-19* perenam bulannya ini Rp. 1.300.000, dan setelah adanya pandemi *Covid-19* pihak pondok memberikan potongan 15% menjadi Rp. 1.100.000, kepada santri yang masih di Pondok Pesantren Mahasiswa tersebut.

Sedangkan dalam di tetapkannya tarif biaya Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* ini tidak di jelaskan secara jelas diawal akan dimulainya perjanjian, bila santri pulang meninggalkan pondok karena adanya pandemi *Covid-19* atau di karenakan hal yang tak terduga dalam waktu yang lama akan tetap dikenakan biaya yang sama untuk membayar biaya pondok yang sama dengan santri yang masih menempati kamar pondok tersebut.

Hal ini juga merugikan santri yang sedang tidak menempati kamar pondok tersebut, karena santri yang sedang pulang kampung dan tidak sedang menggunakan kamar pondok yang ada di pondok pesantren tersebut, berbeda halnya dengan santri yang masih berada di kamar pondok tersebut, mereka yang tetap menggunakan kamar untuk kebutuhan sehari-hari untuk istirahat, penyimpanan barang, dan lemari untuk menyimpan kebutuhan para santri, dan didalam kamar ada

beberapa fasilitas seperti listrik yang biasa digunakan untuk mengecras HP dan Laptop, menggosok baju dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam teori *ijārah* sendiri harus ada manfaat yang itu termasuk salah satu dalam rukun *ijārah*, akan tetapi di masa pandemi *Covid-19* ini dalam hal segi pemanfaatan, tempatnya ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh santri yang terdaftar di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur.

Maka dari itu dengan keadaan dan situasi di dunia pada saat ini menimbulkan kebingungan bagi para pelaku atau pengguna akad *ijārah* ini, di karenakan jasa atau barang yang telah disewa dengan kurun waktu yang sudah ditentukan yang sesuai dengan perjanjian, dan upah atau biaya yang sudah dibayar, namun tempat tersebut tidak dapat di huni secara maksimal.

Dan setelah penulis jelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang timbul pada akad *ijārah* saat pandemi *Covid-19* sesuai dengan hukum islam yang kemudian penulis menuangkan dalam sebuah judul skripsi “**ANALISIS IJĀRAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA KAMAR PONDOK PESANTREN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi kasus Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya)**”

penelitian yang terletak pada sewa-menyewa kamar kost dengan berfokus kepada penyewaan kost menggunakan pembayaran uang muka, sedangkan penelitian peneliti ber objek pada sewa-menyewa kamar pondok pesantren, terfokus pada praktik *ijārah* kamar pondok yang tidak ditempati selama pandemi.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga atas nama Khikmah Nurul Hidayah pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-menyewa (*ijārah*) Dengan sistem pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos (Studi kasus di kembang arum Kelurahan Dukum Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)” penelitian yang di lakukan oleh Khikmah Nurul Hidayah ini ada sedikit persamaan dan perbedaan, persamaannya yakni ada dalam kajian analisisnya, yakni menggunakan tinjauan hukum islam, kemudian persamaan yang lainnya ada pada sewa-menyewa tempat, letak perbedaan dengan penelitian Khikmah Nurul Hidayah ini ada pada objek penelitian. Khikmah Nurul Hidayah menggunakan sewa-menyewa kamar kost dengan berfokus kepada pembayaran penyewaan kost menggunakan pembayaran uang muka, sedangkan penelitian peneliti ber objek pada

⁹ Nurhamidah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad sewa kamar kost (Studi kasus di perumahan paradise garden regency desa Rimbo panjang Kecamatan Tambang)*”, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di skripsi ini ada beberapa bab, yakni dari bab satu sampai bab lima yang mana itu semua ada hubungannya. Dan di dalam bab itu terdiri atas sub bab, supaya di setiap penyusunan skripsi ini bisa melaksanakan analisis data dengan metode yang teratur dan terarah yang itu sesuai pada apa yang sudah dirancang oleh peneliti, oleh karena itu peneliti menyusun pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I, ini membahas pendahuluan yang mana di dalamnya memuat tentang uraian permasalahan yang terdiri atas latar belakang sebuah permasalahan yang hal tersebut akan dikaji dengan teliti sampai dengan sistematika pembahasan.

BAB II, yakni terkait dengan teori. Pembahasannya didalam ini ada hubungannya dengan *ijārah* dan Fatwa DSN MUI yang menjelaskan tentang definisi *ijārah*, dasar hukum, syarat *ijārah* dan rukun *ijārah*. hak dan kewajiban. Dan sampai dengan masa berakhirnya akad *ijārah*.

BAB III, tentang penyajian data, yang mana peneliti memaparkan tentang deskripsi pelaksanaan transaksi *ijārah* kamar pondok di masa pandemi *Covid-19* di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur.

BAB IV, adalah analisis data, memaparkan tentang analisis pelaksanaan *ijārah* kamar Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* menurut *ijārah* dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 ini apakah *ijārah* di pondok ini telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah* dan

mana itu tidak dapat dibagi terkecuali keadaan barang tersebut lengkap. contohnya yakni kendaraan. Menurut madzhab abu hanifah ini tidak diperbolehkan, karena manfaat dan kegunaannya tidak dapat di tentukan.

Akan tetapi mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwasanya menyewakan barang yang tidak dapat di bagi dalam keadaan utuh dan secara mulak itu di perbolehkan, apakah itu sesuai dengan aslinya atau bukan. karena benda yang posisinya itu tidak lengkap, itu juga bisa dimanfaatkan dan penyerahan dapat di praktikkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk beberapa kegunaan tertentu. Sebagaimana hal ini juga di bolehkan dalam hal jual-beli, praktik kesepakatan dalam sewa-menyewa (*ijārah*) itu merupakan salah satu diantara kedua macam transaksi jual beli (*al-bā'i*) jika terkait dengan pemanfaatan benda tersebut masih di ragukan, maka perjanjian tersebut batal atau tidak sah.

d. Sesuatu yang disewakan dapat diberikan dan di pergunakan.

Tidak diperbolehkan menyewakan hewan buron dan juga hewan yang cacat, karena hewan tersebut tidak bisa di serah terimakan. Sehingga akad tersebut menjadi tidak sah. Begitupun dengan tanah persawahan atau perkebunan yang tidak subur atau tandus dan juga hewan untuk jasa pengangkutan yang lumpuh. Karena itu semua tidak dapat menghadirkan manfaat kedalam apa yang akan menjadi objek dari akad tersebut.

di awal perjanjian sewa menyewa barang tersebut yang akan di berikan pada penyewa, apabila tidak ada sebuah kesepakatan yang berhubungan dengan hal itu maka menurut tujuan yang dipersangkakan ini ada hubungannya dengan kondisi dan situasi.

- 2) Penyewa wajib memberikan biaya sewa barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditetapkan.
- 3) Pihak penyewa ini dapat menerima sebuah manfaat dari benda yang akan disewa.
- 4) Penyewa mendapatkan ganti rugi, apabila ada sebuah permasalahan di benda yang akan di sewa.
- 5) Selama dalam masa pemanfaatan barang yang akan di sewa ini penyewa tidak mendapatkan gangguan dari orang lain.

Para pihak dalam melakukan sebuah kesepakatan sewa menyewa prestasinya wajib terpenuhi. Dalam konteks praktik sewa menyewa ini yang berupa memberikan sesuatu (yakni membayar uang sewa dan menyerahkan barang yang di sewa), bisa berbuat sesuatu (yakni dapat memelihara barang yang akan disewakan sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik bagi si penyewa), dan tidak berbuat sesuatu (yakni orang yang menyewa dilarang mempergunakan barang sewaan tersebut untuk kepentingan yang lainnya dan itu di luar dari yang di perjanjikan, sedangkan untuk yang menyewakan barang tersebut di

- d. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah ‘ala al-A’ māl/Ijārah ‘ala al Ashkhash*, baik *Ajir* yang berupa orang (*Shahkshiyah Ṭhabi’iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Shahkshiyah I’tibariyah/Shahkshiyah Hukmiyah/rechtpersoon*).
- e. *Manfā’ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *Ajir*.
- f. *Mahall al-Manfā’ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah ‘ala al-A’yān*.
- g. *Ijārah ‘ala al-A’yān* adalah akad sewa atas manfaat barang.
- h. *Ijārah ‘ala al-Ashkhash/‘ala al-A’ māl* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
- i. *Ijārah Muntahiyyah Bi al-Tamlīk* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
- j. *Ijārah Mauṣufah Fi al-Dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat ‘*Ain*) dan/atau jasa (‘*Amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

- a. Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Shahkshiyah Ṭhabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan maupun tidak berbadan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. *Mu'jir, Musta'jir*, wajib cakap sesuai dengan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku
 - c. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *Ashliyyah* maupun *Niyabiyyah*.
 - d. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 - e. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
5. **Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al A'yūn***
- a. *Mahall al-Manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*Mutaqawwam*).
 - b. *Mahall al-Manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*Maqdur alTaslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijārah Maushufah Fi alDzimmah*.
6. **Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**
- a. Manfaat harus berupa manfaat yang di benarkan (tidak dilarang) secara syariah (*Mutaqawwam*).

- b. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
- c. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
- d. *Musta'jir* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
- e. *Musta'jir* tidak wajib menanggung resiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-Ta'addi*, *alTaqshir*, atau *Mukhalafat al-Syuruth*.

7. Ketentuan terkait *Ujrah*

- a. Boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. Boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan oleh para pihak yang melakukan akad dan sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang kembali atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.

8. Ketentuan Penutup

Dalam pelaksanaannya *ijārah* kamar pondok pesantren yang dilakukan oleh santri disertai dengan kesepakatan dengan pengasuh pondok pesantren, dan santri di sini berhak memanfaatkan kamar yang di *ijārah*-kan dan menikmati fasilitas baik di dalam maupun di luar kamar yang sudah diberikan secara utuh dengan pembayaran dan tempo waktu yang sudah disesuaikan dan sudah di sepakati oleh para pihak.

Dalam kegiatan praktik *ijārah* kamar pondok ada pengasuh pondok dan ada seorang santri, Praktik *ijārah* kamar Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur ini diwajibkan melakukan pembayaran penuh diawal untuk santri baru dengan tempo 1 tahun dan untuk santri yang lama membayar selama 6 bulan sekali, dan juga mengisi biodata dan menyetorkan data diri berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Foto 3x4 dan memberikan kontak pribadi dengan tujuan pendataan penghuni pondok pesantren mahasiswa An-Nur, setelah syarat tersebut sudah terpenuhi maka santri akan sowan ke pengasuh untuk mengetahui tentang kewajiban dan tata tertib sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pengasuh pondok. Dalam diakhir masa perjanjian antar *mu'jir* dengan *musta'jir*, santri juga harus konfirmasi terlebih dahulu ke pengurus guna memilih melanjutkan atau memilih untuk berhenti melanjutkan kontrak. santri diwajibkan mengembalikan kunci kamar dan apapun fasilitas yang ada didalamnya dengan keadaan yang sama, apabila

hubungkan dengan praktik *ijārah* kamar Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur, *mu'jir* di sini sudah berperilaku jujur, transparan dan jelas, baik itu berupa kamar dan fasilitas, ataupun yang lainnya, karena di awal dimulainya perjanjian ini, pihak pondok sudah jujur dan terbuka ke calon santri atau yang sudah menjadi santri, dan dalam syarat terakhir masuk pondok ini adalah sowan ke pengasuh, dan setelahnya pengurus juga memperlihatkan seperti apa kamarnya maka secara otomatis santri mengetahui tempat yang akan ia sewa.

- c. Objek *ijārah* itu dapat di pergunakan manfaatnya baik secara realita, kriteria, dan syara'. Hendaknya santri di sini mengetahui manfaatnya baik secara realita, kriteria dan *syara'*. Dalam praktik *ijārah* kamar di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur ini, santri sudah mengetahui terkait realita dan kriteria kamar yang ada di Pondok Pesantren ini, dan objek akadnya yakni kamar pondok, yang mana tempat tersebut dapat di pergunakan manfaatnya oleh santri atau *musta'jir*.
- d. Manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* ini dapat di serahkan dan dapat di pergunakan (manfaat), sehingga tidak ada permasalahan di akhir hari jika dalam manfaatnya ini belum jelas. Untuk itu dari akad tersebut bisa menjadi tidak sah jika manfaat akan objek yang di sewakan itu tidak jelas. Dalam praktik *ijārah* kamar Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur ini manfaatnya cukup jelas yaitu

pondok pesantren adalah *mu'jir*. praktik *ijārah* Kamar Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur ini sudah sesuai dengan ketentuan umum.

Kedua, ketentuan mengenai hukum dan bentuk *ijarāh*. Pada ketentuan ini, akad *ijārah 'ala al-A'yān* boleh dilaksanakan, karena dalam praktiknya *ijārah* kamar pondok ini tergolong ke *ijārah 'ala al-A'yān* dan dalam ketentuan mengenai hukum dan bentuk *ijārah* ini boleh untuk di realisasikan, oleh karena itu praktik *ijārah* Kamar Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur hukumnya boleh.

Ketiga, yaitu ketentuan terkait *shighat* akad *ijarāh*. Penerapan terkait *shighat* dalam praktik *ijārah* Kamar Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* di Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan, bahwasanya dalam penerapannya *shighat* ini dinyatakan dengan jelas dan dapat di pahami oleh *musta'jir* dan *mu'jir*, yaitu *musta'jir* ingin menyewa kamar Pondok Pesantren Mahasiswa An-Nur, dan Akad tersebut di praktikan secara lisan.

Keempat, yakni ketentuan tentang *mu'jir* dan *musta'jir*, Pada praktiknya *mu'jir* dengan *musta'jir* sudah cakap hukum. *Musta'jir* (santri) juga harus mempunyai kesanggupan untuk membayar *ujrah* kepada *mu'jir* (pemilik pondok), dan *mu'jir* (pengasuh pondok) ini

dibenarkan secara syariah dan barang yang di sewakan juga dapat di serah terimakan dan dalam waktu yang sudah disepakati dalam akad di awal perjanjian. Meskipun di sini santri tidak dapat memanfaatkan apa yang di sewa sepenuhnya, akan tetapi beberapa barang santri yang masih ada di dalam kamar tersebut itu merupakan pemanfaatan yang dapat di ambil oleh santri.

Keenam, yaitu ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa, Pada praktiknya manfaat akan barang yang di sewa oleh *mu'jir* ini di benarkan dan tidak dilarang secara syariah, manfaat dan waktu barang yang di *ijārah*-kan juga jelas sehingga diketahui secara jelas oleh *mu'jir* selaku pengasuh dan *musta'jir* selaku santri, dan terkait dengan ketentuan penggunaan barang dan waktu *ijārah* juga sudah di sepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, yakni manfaat penggunaan kamar pondok dengan masa waktu selama enam bulan atau satu tahun tergantung dengan perjanjian di awal, jadi praktik *ijārah* Kamar Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* di Pondok ini sudah sesuai dengan ketentuan terkait dengan manfaat dan waktu sewa.

Ketujuh, yaitu ketentuan terkait *ujrah*. Ketentuan terkait dengan *ujrah*, Praktik *ijārah* Kamar Pondok Pesantren di masa pandemi *Covid-19* ini waktu pertama kali menyewa kamar pondok, *musta'jir* selaku santri pondok ini sudah mengetahui terkait dengan *ujrah* yang harus di berikan kepada *mu'jir* (pengasuh pondok), pihak

